



PROSIDING

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN

KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI

20-22 MEI 2014

"TRANSFORMASI DEMOKRASI INDONESIA MENUJU PERUBAHAN YANG BERMAKNA"

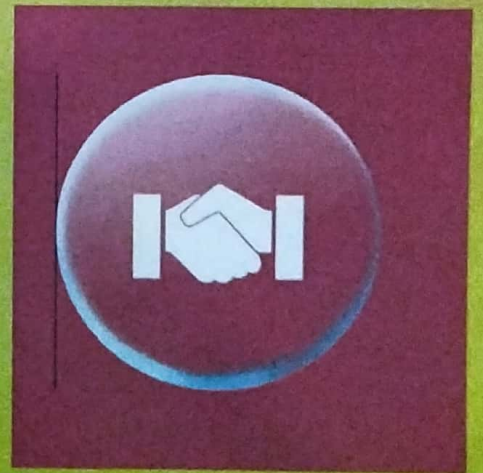


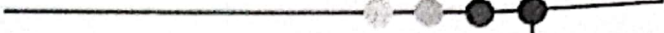
PROSIDING

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UGM

KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI
20-22 MEI 2014

**"TRANSFORMASI DEMOKRASI INDONESIA MENUJU
PERUBAHAN YANG BERMAKNA"**





**PROSIDING
KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI III
TRANSFORMASI DEMOKRASI INDONESIA
MENUJU PERUBAHAN YANG BERMAKNA**

Yogyakarta, 20-22 Mei 2014

Kata Pengantar

TEMA demokrasi begitu populer dalam debat akademik maupun sosial di rentang waktu lebih dari satu dekade, sejak Indonesia keluar dari rezim otoriter. Substansi yang dikupas bukan semata menyangkut narasi besar, akan tetapi juga pengalaman praksis level lokal, di komunitas warga yang dianggap cermin nilai-nilai demokrasi akar rumput. Begitu pula tafsir atau interpretasi atas perubahan di level tata kenegaraan, dinamika masyarakat sipil, perilaku aktor politik, media massa, sampai “jagad tersembunyi” di entitas grass root juga begitu penuh warna. Baik konsep, teori, metodologi maupun pandangan reflektif atas ragam observasi didalam membedah seputar demokratisasi Indonesia.

Para intelektual baik akademisi, aktivis gerakan sosial, budayawan, serta praktisi juga telah banyak melakukan sesuatu dengan berjuta karya. Baik melalui riset, diskusi, advokasi kebijakan, bahkan mengorganisasi masyarakat dengan hasil gemilang. Sepanjang reformasi begitu banyak bermunculan buku, jurnal, risalah-risalah diskusi, policy brief, artikel, ataupun naskah-naskah karya publikasi sejenis yang rata-rata mengamati begitu mendalam agenda pergeseran struktur sosial dan dinamika politik bertajuk demokratisasi.

Apa yang dikompilasikan dalam buku ini—kumpulan beberapa artikel, tidak lain sebagai bagian dari ekspresi perhatian para sosiolog atas situasi demokrasi Indonesia itu. Perhelatan Kongres Nasional Sosiologi III yang digelar oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi (APSSI) beker-

jasama dengan Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) serta Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada 20-22 Mei 2014 lalu di Kampus Universitas Gadjah Mada bertema "Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan yang Bermakna" ternyata telah menelorkan begitu banyak tulisan.

Bentuknya berupa paper panjang maupun artikel pendek, serta prosiding diskusi dalam klaster tematik yang kesemuanya berupaya membaca dari berbagai sudut seputar perjalanan demokrasi dan demokratisasi. Mulai dari soal perayaan identitas, etika politik, kajian media dalam pemilu, relasi kuasa gender, konflik dan kekerasan, kultur dan patronase kuasa, serta soal korupsi dan money politic, dan seterusnya.

Digelarnya perdebatan bertema refleksi demokratisasi Indonesia dalam konferensi tersebut bukan sekadar karena demi memenuhi kegiatan rutin organisasi penyelenggara kongres. Namun, lebih dari itu adalah sebagai bagian dari respon kritis perubahan Indonesia yang oleh sebagian besar analis kritis disebut demokrasi Indonesia dalam babak penentuan dan pertarungan.

Sebagaimana diketahui, gebyar demokrasi dan demokratisasi mengalami hambatan serius. Selain jebakan formalisasi dan defisit dimana terjadi kesenjangan antara rangkaian instrumen kelembagaan dengan substansi nilai-nilai, kelangsungan pembajakan disana-sini oleh aktor-aktor oligark, membuat demokrasi kian memburuk. Risikonya perubahan tidak mendorong emansipasi masyarakat untuk menjadi kekuatan menuju harapan perbaikan. Alih-alih justru apatisisme yang tumbuh.

Situasi bahkan kian membelok terlampau jauh. Karena alasan begitu sumir bahwa reformasi dianggap gagal, karenanya pembicaraan didalamnya pun kurang memiliki daya tarik. Bahkan pesona itu tiba-tiba tergeser oleh romansa politik orde baru (orba) yang ingin dihadirkan kembali dalam khasanah politik Indonesia. Kondisi ini sungguh memprihatinkan, karena arus itu begitu deras berlangsung dalam diskursus di aras komunitas lokal. Biasanya diekspresikan dalam bahasa-bahasa satir, sindiran. Secara terbuka terpampang di sticker, poster dan iklan-iklan, dengan ajakan mengingat jaman orba yang seolah dianggap lebih baik. Perang wacana di media sosial (sosmed) tidak kalah menarik,

karena dalam sejumlah laman kicauan beberapa kelompok mencoba mengkonversikan reformasi yang mandeg kedalam stabilitas politik. Kegaduhan politik dikonversikan dalam tindakan depolitisasi.

Romansa orba ini persis menjadi pintu pembuka project awal bangunan negara otoriter. Tentu saja itulah realitas yang harus dikritisi. Sekalipun reformasi dalam agenda demokratisasi kurang berhasil meraih tujuan perubahan bermakna yakni cita-cita kesejahteraan dan peradaban politik Indonesia yang bermartabat. Akan tetapi kesemua itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengembalikan politik pada jaman otoriter orba.

Sejarah telah berubah, struktur masyarakat juga bergeser, dan orientasi telah disepakati menuju kemajuan bangsa keluar dari jaman kegelapan masa lalu. Itu cita-cita yang dalam sejumlah refleksi mendorong para intelektual menyadari situasi yang memburuk tak musti menyerah dalam konservatisme ataukah kemunduruan. Dalam konteks itu, tantangan terpenting yang perlu dijawab adalah bagaimana mengelola kemampuan masyarakat Indonesia dalam menransformasikan kesempatan berdemokrasi menuju perubahan yang bermakna.

Perubahan yang dimaksud adalah, ketika demokrasi telah menyediakan ruang negosiasi yang makin terbuka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling mempengaruhi, berkontribusi dalam berbagai gagasan agar perbaikan kebijakan baik urusan politik, ekonomi, hukum, HAM maupun agenda-agenda positif lainnya lebih mungkin diwujudkan.

Semoga tulisan-tulisan yang disajikan dalam buku ringkas ini bermanfaat, paling tidak menjadi inspirasi pendalaman debat demokratisasi Indonesia dari sudut pandang para sosiolog. Jikalau ada keterbatasan penyajian, itu menjadi bagian proses saling belajar, karena kritik dan input menjadi penting disampaikan untuk meningkatkan kualitas perdebatan.

Salam,
Arie Sujito
Ketua Program Studi Sosiologi UGM

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Pendahuluan	15
Diskusi Panel	47
Cluster 1: Etika dan Perilaku Budaya Politik (A1)	67
Cluster 2: Etika dan Perilaku Budaya Politik (A2)	105
Cluster 3: Gender dan Representasi Politik	147
Cluster 4: Konflik dan Politik Identitas	185
Cluster 5: Media, Selebritas dan Pencitraan Pemilu	239
Cluster 6: Pemuda dan Pemilih Pemula	277
Cluster 7: Pendidikan Pemilih dan Kualitas Pemilu	297

Cluster 8: Struktur, Kelas, dan Modal dalam Politik	347
Sidang Pleno	355
ETIKA, PERILAKU, DAN BUDAYA POLITIK :	
- Citizenship Negatif di Banten _Ahmad Abrori	371
Dialektika Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Historis _Rosmawati	407
Etos Politik Manusia Indonesia _Yanuardi Syukur	433
Latarbelakang Individu dan Perilaku Politik _Harifuddin Halim, dkk	451
Logistik Pemilu dan Korupsi Politik _Ayu Kusumastuti	479
Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik Melalui Pemilu Berkualitas _Hardilina	503
Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2014 _Slamet Thohari	527
Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif dan Pemilih _Alfitri	549
Potret Etika, Perilaku dan Budaya Politik Pada Pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 _Basri	569

Struktur Kelas dan Modal Politik _Nazrina Zuryani	595
---------------------------------------------------	-----

Transformasi Perilaku Politik Berbasis Nilai Lokal _Ansar Arifin, dkk.	605
------------------------------------------------------------------------	-----

Wacana Politik Pilgub Jawa Timur 2013_ Siti Khoffah dkk	629
---------------------------------------------------------	-----

GENDER DAN REPRESENTASI POLITIK :

Etnisitas dan Peran Politik Perempuan _Sindung Haryanto	655
---------------------------------------------------------	-----

Maskulinitas Dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik _Argyo Demartoto	685
-----------------------------------------------------------------------	-----

Modal Sosial Caleg _Diana Dewi Sartika dan Eva Lidya	705
------------------------------------------------------	-----

Representasi Kepentingan Perempuan Dalam Partai Politik _Siti Zunariyah dan Irine Rizkyana	717
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Revitalisasi Pendidikan Politik Berperspektif Gender _Syarifah Ema	745
--------------------------------------------------------------------	-----

Suara Perempuan Kemana _Ina Restiani H	771
----------------------------------------	-----

KONFLIK DAN POLITIK IDENTITAS :

Islamism From Below_Abdil Mughis	799
Politik Identitas Berbasis Agama_Fitri Harahap	815
Politik Identitas Islam Dan Empat Perang Aceh_M. Nazaruddin	829
Tantangan Demokrasi Di Daerah Bekas Konflik _Fajri	881

MEDIA SELEBRITAS DAN PENCIPTA PEMILU :

Demokrasi Online-Offline_Derajad S. Widhyharto.	967
Dramaturgi Aktor-Aktor Politik_Andi Burchanuddin,dkk.	933
Parodi Kampanye Pemilu di Media Jejaring Sosial_Sri Murlianti	957
Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pemasaran Politik_ Sigit Pranawa	983
Politik Selebritas Atau Selebritas Politik _Warsisto	1003
Stand Up Comedy Menyuarakan Demokrasi Di Indonesia_Ikma Citra	1021
Teater Rakyat Media Alternatif Bagi Pemilih Marginal_Sih Natalia Sukmi	1045

PEMULA DAN PEMILIH PEMULA :

Manfaat Pertemuan Informal_GPB Suka Arjawa	1063
Muda Muslim Modern_Najib Azca dan Zaki Arrobi	1077
Optimalisasi Dan Partisipasi Pemilih Pemula_Sri Hilmi Puji Hartati	1093
Partisipasi Pemilih Pemula_Deere Dirk Veplun	1099
Peran Politik Pemuda_Miswanto	1109
Persepsi Pemilih Muda Di Kota Surabaya Terhadap Pemilu 2014_Tuti Budirahayu dkk	1127

PENDIDIKAN DAN KUALITAS PEMILU :

Faktor Pemilih Penentu Arah Kualitas Pemilu_Sudaru Murti	1153
Pendidikan Demokrasi Untuk Mencerdaskan Rakyat_Bagus Haryono	1171
Pendidikan Politik Untuk Perwujudan Demokrasi Yang Berkeadilan _Alum Simbolon	1193
Performa Calon Legislatif Dan Pendidikan Politik_ Dewi Cahyani P	1223

STRUKTUR KELAS DAN MODAL DALAM POLITIK :

Gerakan Komunitas Kota dan Politik 1249

Pemilu dalam Pemenangan Ridwan

Kamil_Wahyu Gunawan dkk

Merekonstruksi Demokrasi

1275

Indonesia_Erik adiyta Ismaya

Transformasi Demokrasi Menuju Perubahan

1285

Yang Bermakna_Pamedri Giri Wiloso

PENDIDIKAN DAN KUALITAS PEMILU



● ● ● ●

FAKTOR PENDIDIKAN PEMILIH PENENTU ARAH KUALITAS PEMILU

Sudaru Murti
Prodi Sosiologi
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa Yogya-
karta
murtizagita@yahoo.co.id

Abstrak

Tahun 2014 merupakan tahun politik dimana setiap warganegara memiliki hak untuk melakukan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana realisasi kelanjutan perjuangan reformasi. Demokratisasi dapat diartikan sebagai proses penyerahan kekuasaan hak bernegara diserahkan pada DPR, untuk menjalankan fungsi legislasi, penyusunan anggaran dan pengawasan dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan untuk waktu lima tahun ke depan.

Ada pun persebaran penduduk berdasarkan kriteria wilayah; Kota-Pedesaan, Pusat-pedalaman, dalam-luar negeri akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengalaman warganegara dalam penerimaan kesadaran akan pembentukan persepsi informasi yang diterima, yang

berhubungan dengan hak-hak dan tanggungjawab tampak bergradasi. Perbedaan pengetahuan dan pengalaman tergantung pada pendidikan formal yang dimiliki, pendidikan informal dalam pembentukan sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun pendidikan non formal yang diperoleh dan dilakukan. Seiring konsep "The four Pillar of education" oleh Unesco (1997) melalui; learning to know, learning to do, learning to live together dan learning to be, tidak terlepas pada proses transformasi berpikir dekonstruktif untuk meningkatkan rasionalitas, kemudian berpikir rekonstruksi yang mendorong sensitivitas yang pada akhirnya pembentukan reinterpretasi pada pilihan tindakan yang dilakukan. Transaksional dalam penyerahan kepercayaan akan kekuasaan (demokratisasi), diharapkan berkehidupan yang diperoleh ada perbaikan kearah peningkatan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan (Morcel Mauss, 1992: 119-120). Proses yang dilalui tergantung pada berbagai media komunikasi yang mewarnai pembentukan pengetahuan dan pengalamannya. Efektivitas komunikasi (Jalalludin Rakhmat, 1999) mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung, berbanding lurus akan kualitas pemilu sebagai pesta demokrasi. Pembentukan model pesta demokrasi, penentu akan kesadaran hak-hak pilih warga masyarakat. Namun kendala dan parameter akan kualitas pelaksanaan pemilu yang berlangsung, dan berbagai perbedaan yang tidak mempengaruhi secara signifikan.

Pemilih yang cerdas dan bermartabat, sebagai pengembangan pemilu sebelumnya yang berorientasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Perampingan jumlah partai politik sebagai wadah, telah dilakukan selektivitas dengan kriteria yang selalu disempurnakan. Penyempurnaan pelaksanaan pemilu sebagai manivestasi kemajuan, diharapkan pelaku pesta demokrasi senantiasa mempergunakan hak-haknya secara bijak.

Kata Kunci: pendidikan, demokrasi dan pemilu

I. Pendahuluan

Kemerdekaan yang dicapai oleh Negara Republik Indonesia, oleh para founding father telah dirintis demokrasi bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berkehidupan bernegara. Ada pun persyaratan kehidupan yang demokrasi memiliki tiga persyaratan dalam merealisasikan yakni: pertama; Adanya undang-undang yang menjamin hak-hak politik bagi setiap warganegara, kedua; adanya kebebasan pers sebagai penyaji informasi dan pengontrol kehidupan sosial, ketiga; Pemilihan umum yang jujur dan lembaga perwakilan yang otonom.

Pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD'45, sejarah pelaksanaan di, Indonesia baru bisa diselenggarakan mulai tahun 1955 pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, melalui dua agenda, yaitu memilih Wakil rakyat di DPR pada 29 September dan memilih anggota konstituante pada 15 Desember 1955 yang berlangsung jujur, adil dan demokratis, namun tidak menumbuhkan tatanan pemerintahan yang menentramkan dan menenangkan dimana multi partai hanya saling bertikai. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1966 pada masa Orde Baru, diawali adanya penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara melalui tragedi peristiwa Lubang Buaya. Prestasi era Rezim orde Baru yang telah ditunjukkan bahwa telah diselenggarakan pemilu sebanyak lima kali yaitu pada tahun 1971, 1982, 1987, 1992 dan 1997, yang diawali adanya harapan masyarakat berlangsungnya perubahan terhadap tatanan pemerintahan dan kehidupan Negara yang lebih demokratis, namun pada kenyataannya malahan kondisi yang mematikan ketiga persyaratan kehidupan demokratis melalui apa yang disebut dengan demokrasi pancasila (Majalah Majelis, Maret 2014).

Tonggak perkembangan selanjutnya pada konstilasi politik pasca pemilu 1997 tidak bertahan lama ditengerei adanya gerakan golongan putih yang dimotori oleh Arief Budiman dikarenakan keterpihakan militer dengan pemerintah terhadap partai tertentu, memicu peristiwa gerakan reformasi pada 21 Mei 1998. Pada saat itulah runtuhnya rezim Orde Baru, kemudian memasukl rezim reformasi yang memiliki pelu-

ang untuk menata kembali kehidupan demokrasi melalui pemilu yang jujur, adil dan luber yang menggantikan hasil pemilu 1997 (psi 22E ayat 1 UUD'45). Oleh karena itu pemilu pertama di masa reformasi diselenggarakan pada tahun 1999 yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai sebesar 92 persen, walaupun diwarnai adanya kejutan dan keprihatinan dimana PAN sebagai gerbong gerakan reformasi hanya memperoleh suara pada urutan yang ke lima. Pelaksanaan pemilu tahun 1999 relatif lebih adil dan jujur dibandingkan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Selanjutnya pemilu di era reformasi telah diselenggarakan pemilu pada tahun 2004 dengan tingkat partisipasi pemilih yang mulai menurun menjadi 81 persen dan 2009 dengan tingkat partisipasi pemilih yang semakin menurun menjadi 71 persen walaupun telah diadakan pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia untuk pemilihan langsung legislatif dan pemilihan presiden oleh rakyat. Adapun angka golongan putih (golput) pada pelaksanaan pemilu 1999-sesudah reformasi hanya sebesar 10,40 persen, namun mulai tahun 2004 telah mencapai 23,34 persen dan dasawarsa reformasi, pemilu tahun 2009 mengalami lonjakan cukup fantastis mencapai di atas 30 persen (Majalah Majelis, Maret 2014). Jika ditelusuri lebih lanjut, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat; pemilih pemula sudah dipastikan juga semakin meningkat. Persoalan yang menarik, proses pendidikan politik sebagai media penyadaran terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan lancar, dimana jumlah pemilih pemula meningkat tetapi partisipasi semakin menurun. Atau informasi terhadap kelompok usia tua kurang efektif, sehingga masih melekatnya ikatan primordial pada rezim Orde Baru melalui perbandingan kehidupan keseharian yang dirasakan semula serba mudah dan enak, kemudian dirasakan kehidupan yang semakin sulit. Pada usia produktifpun tidak menutup kemungkinan memberi kontribusi menurunnya partisipasi, dikarenakan pandangan hidup yang berorientasi pada materi serta persaingan yang dirasakan semakin menyusahakan kehidupan memasuki era globalisasi.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, prosesi pelaksanaan pemilu dapat dikatakan belum optimal. Kemudian persiapan untuk pemilu 2014 demi penyempurnaan, kelengkapan penyelenggaraan telah tertuang di UU No.8 tahun 2012 dengan menambah adanya Bawaslu dan teknis persiapan pelaksanaannya dan waktu yang diberikan lebih awal yang diharapkan dapat lebih siap dan mendorong adanya penyempurnaan. Namun pada pelaksanaan pemilu 2014 diindikasikan pelanggaran kode etik menunjukkan angka yang cukup tajam walaupun tingkat golput menurun hingga 24,89 persen atau 60.853.533 tidak menggunakan hak suaranya (KR, 29 April 2014), dimana ada kecenderungan kehidupan berbangsa dan bernegara tahap awal memilih DPR, DPRD dan DPD menunjukkan ada ketidakjujuran dalam penyelenggaraan seperti money politic dengan berbagai bentuk, yang kecenderungannya transaksional dan masih cukup tajam golongan putih dikarenakan berbagai latarbelakangnya. Pada akhirnya pelaksanaan kekuasaan legislatif dalam legilasi, penganggaran dan pengawasan, memiliki indikasi adanya potensi transaksional bagi peserta pemilu untuk melakukan perhitungan, ketika pesta demokrasi lanjutan dalam pemilihan presiden. Distribusi kekuasaan hasil pemilu sebelumnya, penyelenggaraan pemerintahan banyak mengalami penyimpangan korupsi yang sarat oleh kepentingan kelompok. Oleh karena itu penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pendidikan pemilih bisa mempengaruhi arah kualitas pemilu?

A. Struktur dan Sistem Politik

Pemilu 2014 sebagai proses kegiatan penyerahan kedaulatan rakyat melalui perwakilan DPR, DPRD dan DPD yang diselenggarakan setiap lima tahunan, pada era reformasi telah mengalami amandemen terhadap pengembangan isi UUD 45. Landasan yuridis pemilu yang telah mengalami amandemen pada perubahan ketiga, dimana dimasukkan pada BAB VIIB pasal 22E dilengkapi UU No,8 tahun 2012.

Ada pun proses pemilu meliputi kelompok pemilih, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, yang masing-masing kelompok memiliki hak dan tanggungjawab sesuai yang diamanatkan dalam UUD'45 yang telah diamandemenkan. Implementasi regulasi pemilu tidaklah sederhana, berhubungan dengan sistem politik demokratik yang berkorelasi dengan kebudayaan politik partisipan. Sebab sistem demokrasi memiliki makna memberi kemerdekaan dan peningkatan harkat martabat individu melalui penyelenggaraan pemerintah dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu penyelenggara pemilu melakukan persiapan manajemen, administrasi, sarana dan prasarana sesuai dengan program dan prosedur dalam menjaring pemilih dan peserta pemilu. Realitasnya cukup sulit dikarenakan wilayah Negara yang terdiri berbagai pulau-pulau menyebabkan adanya kesenjangan informasi, kesamaan persepsi sebagai penyelenggara dan pengetahuan khususnya kelengkapan sarana dan prasarana antara pusat dan daerah sering menentukan kesempurnaan pelaksanaan pemilu. Apalagi peserta pemilu melalui seleksi partai-partai, dirasakan adanya kendala pada proses rekrutmen dan pengkaderan calon terpilih di legislatif. Ada pun persebaran penduduk berdasarkan kriteria wilayah; Kota- Pedesaan, Pusat-pedalaman, dalam-luar negeri akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengalaman warganegara dalam penerimaan kesadaran akan pembenturan persepsi informasi yang diterima, yang berhubungan dengan hak-hak dan tanggungjawab senantiasa bergradasi. Perbedaan pengetahuan dan pengalaman tergantung pada pendidikan formal yang dimiliki, pendidikan informal dalam pembentukan sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat ma-

pun pendidikan non formal yang diperoleh dan dilakukan. Pemilih yang memiliki sifat dinamis dikarenakan faktor usia, dapat dikelompokkan sebagai pemilih pemula, pemilih potensi dan pemilih lansia. Belum berdasarkan pada wilayah permukiman menurut data BPS (tahun 2010) dapat dikategorikan kota-desa yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan, perdesaan, bantaran sungai, sub-urban, hutan kemasyarakatan,, pantai, dan pegunungan memiliki karakteristik dan berbagai keterbatasan pengetahuan maupun informasinya. Belum berdasarkan jenis kelamin laki-laki perempuan, pada kelompok pemilih, memiliki perbedaan yang signifikan terhadap pendidikan politik, sehingga persepsi tentang pemilu akan mewarnai kesadaran hak-haknya serta ketertarikan politik dalam pelaksanaan pemilu.

Menurut Mohtar Mas'oeed dan Nasikun (1987) melakukan proses sosialisasi politik sebagai pencapaian kehidupan demokrasi, membutuhkan proses waktu yang cukup lama agar mendorong tumbuhnya kesadaran warganegara berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan politiknya. Sebab hubungan antara sosialisasi politik dan kelestarian tertib politik akan seiring dengan dinamika sosialnya. Untuk meyakinkan warganegara akan penyerahan pilihan haknya sesuai dengan sistem politiknya, pada akhirnya akan menentukan pula tertib politik selanjutnya. Hal ini tergantung dari kemampuan sosialisasi yang strategis, diawali dari lingkungan keluarga dalam memberikan pendidikan politik; dimulai pengenalan peran social sesuai dengan status sebagai anggota keluarga, bagaimana untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan hak dan tanggungjawabnya. Akan lebih mudah memperkenalkan cara bertindak atau pola-pola perilaku sesuai dengan nilai dan norma budaya sebagai warganegara, jika keteladanan dan pengetahuan yang mempengaruhi kesadaran selalu diperhatikan dan pada akhirnya akan tumbuh kesadaran kedudukannya sebagai warganegara. Pendidikan formal diharapkan penyusunan kurikulumnya bermuatan peningkatan kesadaran hak, kedudukan dan tanggungjawab pada setiap warganegara akan mempengaruhi kesadaran intelektual. Kemampuan ini dalam proses pembentukan penyaringan dan pertilangan dalam bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai harkat dan martabat dalam

berkehidupan politik. Artinya pendidikan yang memiliki tujuan ingin membenarkan proses dorongan pada sikap selektivitas dari pengaruh yang tidak mendukung pada nilai-nilai dan norma budaya terhadap tertib politik. Pemilu di era globalisasi memiliki tantangan yang berat, mengingat tidak ada lagi tirai tabir yang menyeleksi pengaruh politik dunia terhadap proses budaya politik yang tidak sesuai kondisi politik negara, hanya akan membahayakan ketidaktaatan sikap perilaku warganegara akan keanekaragaman informasi dan komunikasi dari sistem politik yang berlaku. Kurikulum disusun untuk memperkuat kesadaran akan kewarganegaraan dan jatidiri politik, sehingga akan mendorong keterikatan positif yang sangat kuat terhadap keterlibatan pada negara. Kesetiaan dan loyalitas sebagai keberhasilan sosialisasi politik, akan membawa pada dedikasi terhadap proses pembentukan kepribadian. Pribadi unggul akan selalu mampu menyeleksi pengaruh yang dianggapnya akan melunturkannya rasa nasionalisme. Faktanya; pertama: pewarisan budaya dan perkembangan kepribadian mempermudah pemanfaatan proses sosialisasi politik. Kedua: Keluarga yang mampu membenarkan pengalaman-pengalaman awal pada masa kanak-kanak, akan mempengaruhi nilai-nilai masa dewasa nantinya. Pengaruh pembentukan pandangan politik dalam memelihara eksistensinya, diharapkan mampu mengembangkan pandangan-pandangan politik warganegara melalui kemampuan adaptasi akan situasi pemegang kekuasaan dalam praktek politiknya. Dengan demikian proses pertumbuhan anak dari keberagaman potensi, mudah memahami berbagai keberagaman pola-pola perilaku yang berlaku di dalam lingkungannya. Pertumbuhan demokrasi dapat terlihat pada cara-cara bertindak dan adat politiknya dari pendidikan dan karakter politiknya.

Menurut Talcott Parson (dalam Irving M. Zeitlin 1995) Konseptualisasi mengenai kepribadian dan adaptasi sikap-sikap perkembangannya berkorelasi akan pengalaman-pengalaman pembentukan nilai-nilai politik sebagai pemelihara nilai yang menentukan pewarisan standart-standart perilaku yang diwariskan dalam memilih kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagai pengembangan identifikasi kewarganegaraan, agar diperoleh pengakuan akan pemeliharaan nilai-

nilai politik dan mampu mengambil posisi sesuai dengan perannya ; yang melahirkan integrasi pada sikap dan perilakunya dalam kesempatan penggunaan hak dan tanggungjawab warganegara. Sinerginitas antara peran keluarga, sekolah dan pengalaman-pengalaman berkelompok akan menentukan partisipasi dalam setiap peristiwa politik, seperti; kemampuan mewakilkan aspirasinya pada legislatif untuk mendukung penyusunan rancangan perundang-undangan, memberikan tanggapan-tanggapan terhadap kebijakan-kebijakan, program-program dan kejadian politik tertentu. Disamping itu pengenalan berbagai ragam pengetahuan tentang berbagai lembaga-lembaga politik; DPR, DPD, MPR, lembaga kepresidenan, lembaga yudikatif, partai-partai politik, menumbuhkan keterikatan terhadap berbagai lambang dan simbol-simbol politik serta loyalitas terhadap negara. Sebab kesadaran warganegara yang memiliki legitimasi sebagai akibat penentuan sistem politik, dimana kekuasaan kedaulatan ada di tangan rakyat melalui perwakilan kekuasaan ditangan legislatif. Persyaratan yang dibutuhkan tergantung pada kematangan dan kedewasaan, dalam memberikan gambaran identifikasi patriotik terhadap negara serta apresiasinya pada berbagai lembaga dan kebijakan-kebijakan. Demokrasi sebagai pilar kedaulatan rakyat harus terus diselenggarakan melalui pemilihan umum lima tahunan, diharapkan sebagai prosesi loyalitas dalam memberikan kepatuhan sistem politik yang dianut dan menjadi bagiannya dengan cara mematuhi berbagai peraturan yang dibuat dan ditetapkan dalam pelaksanaannya.

B. Pendidikan Pemilih dalam Demokrasi

Pemilihan Umum yang diamanatkan UUD'45 pasal 22E yang telah diamandemen, tidak terlepas sebagai implementasi dari demokrasi. Pelaksanaannya setiap lima tahunan dan pemilu 2014 telah disempurnakan melalui Undang-undang No.8 tahun 2012 dalam menyempurnakan kelembagaannya dengan ditetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu oleh Komite Pemilihan Umum (KPU) melalui asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) yang bersifat Jujur dan Adil (Jurdil).

Pelaksanaan Pemilu sebagai manifestasi pesta demokrasi, diselenggarakan oleh KPU, untuk menetapkan pemilih Pemilu membutuhkan waktu dan koordinasi instansi terkait dari RT hingga propinsi, kedutaan kementerian bagi pemilih pemilu yang keberadaan di luar negeri dalam penetapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih nantinya akan memilih anggota DPR, DPRD dan DPD yang berkualitas sebagai wakil rakyat yang mempunyai kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat yaitu menyusun dan menetapkan perundang-undangan, bersama presiden menyusun Anggaran dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Rekrutmen pelaksanaannya oleh partai peserta pemilu yang telah disyaratkan dan ditentukan berdasarkan hasil lolos seleksi. Calon legislatif direkrut oleh partai dengan kesamaan asas ideologi yang sama dan kader partai yang telah diseleksi kemudian ditempa sesuai dengan semangat kepartaian. Proses idealnya, calon legislatif yang akan dipilih dalam pemilu, membutuhkan proses waktu dalam penguatan politik, identifikasi politik dan pembudayaan politik melalui pendidikan kepartaian politik. Popularitas calon legislatif sangat signifikan dalam pencapaian-pencapaian tujuan organisasi politik didirikan, sesuai dengan bidang penguasaan masing-masing kebutuhan dalam percepatan pencapaian kesejahteraan dan berkeadilan social bagi rakyat yang mempercayakan. Heterogenitas pemilih yang berlatarbelakang pada struktur sosial, memiliki pemenuhan harapan yang amanah dan bertanggung jawab sebagai wakil penyelenggara pemerintahan dan negara agar tidak diragukan lagi akan spirit keterwakilan. Kemampuan pemegang man-

dat kedaulatan yang memadai untuk menjalankan tugas wakil rakyat, dengan memiliki keterikatan dan kepatuhan pada standar nilai-nilai kepartaian dan negara melalui proses pelatihan dan pendidikan pada kurun waktu tertentu. Seleksi calon legislatif juga tidak terlepas pada kemampuan menjaring aspirasi rakyat terutama di daerah pemilihan, agar berbagai permasalahan yang krusial dapat terselesaikan sesuai dengan penguasaan norma yang telah disyaratkan pada misi dan visi partai, melalui tindakan nyata tidak hanya menjelang pemilu diselenggarakan. Pelembagaan calon legislatif melalui pendidikan politik, memiliki kelebihan penunjukkan usaha langsung dan sengaja untuk mentransformasi orientasi-orientasi politik partai. Orientasi ini dimaksudkan agar memperoleh pengalaman politik, yang dapat menemukan dan mengembangkan kepercayaan politik partai, penyamaan persepsi yang mengarahkan perilaku yang telah distandarkan. Calon legislatif kader partai politik dapat diukur melalui bagaimana keinginan-keinginannya dapat ditransformasikan pada kinerja yang ditentukan partai dan negara dalam proses politik dalam menjalankan perwakilan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan, maupun keberhasilan yang diperoleh dari pengalaman-pengalamannya dalam proses politik.

Pemilih pemilu yang diharapkan cerdas dan bermartabat, pada pemilu tahun 2014 belum menggembirakan dikarenakan tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 75,11 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), golput yang mencapai 24,89 persen dikarenakan faktor usia lanjut tidak didatangi petugas untuk mempergunakan hak pilih, kelompok pemilih pemula yang tidak tahu dan minim informasi prosedur penguasaan dikarenakan kerja ataupun melanjutkan studi di lintas propinsi, maupun kelompok difabel yang belum mendapatkan pelayanan sesuai dengan keterbatasannya. Upaya sosialisasi menjelang pemilu telah dilakukan melalui berbagai media seperti media elektronik, media cetak maupun media sosial, diharapkan memiliki kesadaran akan hak-haknya dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan dan negara lima tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan berkeadilan sosial ternyata belum efektif.

Idealnya pelaksanaan pemilu bagi pemilih, pemberian pilihan keterwakilan yang diberikan, merupakan suara pilihan yang tidak bisa dibeli melalui money politic. Partisipasi dalam memilih wakil rakyat telah dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu melalui daftar pemilih tetap (DPT), memberi jaminan adanya kepercayaan pengamanan suara yang benar-benar terjaga dan penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal dan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan dengan meminimalkan penyimpangan-penyimpangan.

Ketidakberhasilan peningkatan kualitas pemilu, dikarenakan kondisi pemilih yang heterogin baik pada penyebaran wilayah, struktur pendidikan dan pengalaman pemilih, katagori pemilih dan jenis kelamin pemilih tidak mudah membentuk kesadaran untuk berpartisipasi. Sosialisasi politik dalam pengenalan sistem politik seperti uraian di atas, tidak terlepas dari proses politik yang diakomodasikan bagi pemilih. Langkah-strategis yang direkomendasikan Unesco (1997) The four pillar of education yang dapat dilakukan pertama; learning to know. Berdasarkan kondisi pemilih yang heterogin, proses politik yang diperkenalkan dari berbagai kondisi pemilih, dapat menjangkau seluruh pemilih dalam memberikan kesadaran akan kehidupan berwarganegara. Artinya pemilih senantiasa di sadarkan akan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara, memperkuat dan memeperteguh penggunaan hak politik dalam memberikan suara sebagai manifestasi pemberian kepercayaan pada calon legislator yang dipilih. Menurut Marcell Mauss (1992) setiap warganegara harus diyakinkan, bahwa pemilihan keterwakilan ini, mempercayakan janji tindakan yang akan dilakukan sebagai pemberian penghormatan maupun otoritas Pengikatan dalam hubungan yang resiprokal dalam posisi pertukaran, tidak berdasarkan adanya pengaruh kepentingan sesaat untuk terpilih, melainkan pada kesadaran pemilih menyerahkan kepercayaannya dan mendapatkan timbalbalik. Perwakilan dalam pemilu agar dipilih, dapat dilakukan proses komunikasi politik melalui kontinuitas kunjungan berbagai pihak yang memiliki kepentingan pembentukan persepsi yang benar akan kesadaran warganegara terhadap hak dan tanggungjawab pada negara setiap lima tahun ke depan. Pendekatan budaya masing-masing daerah ses-

uai karakteristiknya, membutuhkan per-siapan dan waktu yang cukup lama, agar memudahkan pembentukan pemikiran positif akan proses transformasi kesadaran pemilu pada setiap penyempurnaan penyelenggaraannya. Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai key person dalam pengenalan pada kelompok pemilih usia lanjut, perlu penjelasan yang mudah diterima terhadap pengalaman-pengalaman politik dari pemilu sebelumnya yang tidak sesuai harapan, untuk diajak membantu memperbaiki kehidupan bernegara yang rasionalistik (Jallaludin Rakhmat, 1999). Komunikasi politik yang benar, membantu terbentuknya pemikiran dan persepsi yang positif terhadap pemilu; mendorong pemahaman pemilu juga akan melahirkan interpretasi yang baik dan positif. Jika pemahaman tersebut memberikan harapan, partisipasi dalam pemilu tidak akan menurun dan tidak menutup kemungkinan semangat terhadap hak sebagai warganegara, untuk lebih bertanggungjawab akan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua: learning to do. Keberhasilan pemilu, jika tingkat partisipasi warganegara tinggi. Pada kelompok pemilih pemula membutuhkan keteladanan dan informasi yang benar. Kelompok ini memiliki kekritisian dalam bersikap dan berperilaku, seiring usia yang sedang mencari jati diri. Keteladanan ditunjukkan pada proses politik, dimana sikap kenegarawan dapat diikuti sejak masa kanak-kanak yang memberikan pengalaman politik untuk kesediaan melepaskan kesetiaan pada kelompok ataupun partai demi kesetiaan pada negara dan bangsa. Pada kelompok ini ada kecenderungan pencarian jati diri politik, melalui pencarian identitas politiknya dalam pema-hamannya, kemudian akan diinterpretasikan melalui pencocokan pada berbagai media informasi seperti social, elektronik dan cetak yang biasanya dijadikan sebagai peer group dalam melangkah pada pemilu. Kelompok pemilih pemula potensial kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sepanjang pencarian informasi yang tidak keliru dan menyesatkan. Kelompok ini rawan menyikapi pemilu, apatis atau bersemangat tergantung pada keteladanan, walaupun kurikulum pendidikan formal telah memberikan tempat dan ruang dalam berkomunikasi politik. Kelompok potensi akan menyikapi pemilu dengan lebih berakomdatif dengan berbagai kepentingan yang

akan diperoleh. Latarbelakang pendidikan yang diperoleh, akan menentukan pengetahuan dan pengalaman dalam partisipasi politiknya. Kontribusi politik yang diberikan, tergantung pada lingkungan politik yang diikuti sesuai dengan apa yang telah menjadi perhatiannya dalam proses politik. Sikap kritis dilakukan, sepanjang tidak memnuhi kebutuhan yang menjadi harapannya. Akibatnya partisipasi pada derajad yang tinggi bahkan pada penyelenggaraan kampanye akan selalu dicermati dan diperhatikan pada kelompok yang telah sadar akan hak dan tanggungjawab. Usia potensi pada kelompok yang kalah dalam perjuangan dan pergaulan hidup, akan rentan pada potensi rayuan kepentingan sesaat. Peluang dalam pemilu dijadikan adanya penunjukkan kebanggaan akan kepemilikannya dalam katagori pengalihan semu akan kekurangan dalam proses politik selama ini. Ketaatan dan kemilitan sangat kuat, jika pengakuan semu diberikan hanya dikarenakan adanya pengakuan sesaat pada peneapaian pada pesta demokrasi. Selain itu pada kelompok usia potensi yang berada diluar kedua kelompok tersebut di atas, partisipasi yang diberikan lebih berhubungan dengan penilaian dan pengalaman apa yang dilihat ataupun yang didengar akan dijadikan referensi dalam partisipasi pemilu.

Sementara kelompok usia lanjut lebih pada status qua dalam berpartisipasi pemilu, dimana berharap adanya perubahan dalam pemilu. Kejayaan sebelum reformasinya yang memberikan kenyamanan dan kenikmati yang telah dirasakan.

Ketiga learning to live together pada penyelenggaraan pemilu dibutuhkan sinerginitas semua kelompok kepentingan, apalagi dengan amandemen pemilu yang dilakukukan. Selaku penyelenggara pemilu oleh Komite Pemilihan Umum (KPU) dan telah disempurnakan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyimpangan dan pelanggaran pemilu di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Fungsi pengawas dan pengontrol bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih pemilu. Kebersamaan penyelenggaraan pemilu diharapkan seminimal mungkin diketemukan pelanggaran dan penyimpangan dalam tataran administrasi, manajemen maupun yuridis. Bawaslu yang pertamakali bekerja pada tahun

2014, diharapkan bisa bekerjasama bersama tripartite pemilu. Penentuan kualitas pemilu, juga tergantung pada catatan-catatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Indipendensi masing-masing kelompok pemilu dijaga tanpa terlepas pada koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dalam kebersamaan sangat diapresiasi. Kecurangan dan pelanggaran yang menduduki rangking teratas setiap penyelenggaraan pemilu, dikarenakan masing-masing tripartite pemilu mempergunakan dan menerapkan standart kebenaran dan penilaiannya sendiri. Pertanggungjawaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menentukan akuntabilitas oleh badan-badan pemilu kepada warga masyarakatnya. Kericuhan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, disamping belum ada Bawaslu juga konpirasi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tidak bersikap transparan terhadap kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran pada setiap srata administrasi dan proseduralnya. Akibatnya pemilih pemilu hak mengkritisi dirasakan diabaikan kecuali hanya menerima laporan penyelenggaraan taupa berkesempatan mengontrol dari persiapan hingga selesainya penyelenggaraan pemilu. Pembelajaran ini diharapkan dapat lebih menyempurnakan penyelenggaraan pemilu pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, walaupun belum pada tataran sempurna seperti yang tersurat dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan. Paling utama yang perlu diperhatikan dalam proses demokrasi, mendorong menumbuhkan nilai-nilai budaya politik yang positif serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak azasi manusia pada hak sipil, hak sosial dan hak reproduksi pada setiap penyelenggaraan proses demokrasi. Proses politik yang mendorong adanya jatidiri politik, mempermudah kooperatif pencapaian kesejahteraan sosial dan berkeadilan sosial.

Keempat Learning to be dimana kesejahteraan dan berkeadilan sosial dalam pencapaian penyelenggaraan proses demokrasi, yang dapat dilihat dan diikuti dari tingkat partisipasi warganegara, ketaatan dan tertib politik pada peserta pemilu dan transparansi penyelenggaraan pemilu mengindikasikan kesuksesan dan keberhasilan transformasi demokrasi dalam proses politik. Idealisme dalam parameter proses politik, tidak terlepas pada proses berpikir dan bertindak dalam tataran

pemikiran rekonstruksi penemuan jatidiri politik bangsa dan negara, sehingga kemampuan berpikir dalam reinterpretasi dalam pesta demokrasi secara tepat sasaran dan proporsional. Pencapaian tujuan tercapai, dapat diketahui dari tingkat partisipasi politik mendekati 100 persen dari warganegara yang telah berhak dan penyimpangan-pelanggaran tidak bersifat prinsipil yang mengurangi nilai-nilai diselenggarakan pemilu. Pelaksanaan dapat berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, tetapi tidak menyimpang dari nilai-nilai budaya politik negara dan bangsa yang melunturkan jatidiri politik. Kompetensi pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses demokrasi, tidak hanya pada saat berlangsungnya penyelenggaraan demokrasi, tetapi proses pendidikan politik dapat dilakukan berkesinambungan seperti uraian di atas. Politik praktis yang sarat dengan money politic hanya merendahkan harkat dan martabat bangsa bagi pemilih dan yang dipilih, mengingat tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sangat jauh. Kecerdasan pada budaya politik perlu ditumbuh kembangkan seiring dinamikanya, yang pada akhirnya simpati pemilu diperoleh pada semua warganegara sesuai dengan struktur masyarakatnya. Setiap warganegara sebagai subyek sekaligus obyek, melalui kesadaran sikap perilaku berpartisipasi dalam proses politik dalam merealisasi tujuan bersama yang telah ditentukan. Proses waktu dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal; dapat memberi dorongan kekuatan memberi kontribusi terhadap pengetahuan dan pengalaman dalam proses politik. Budaya politik ditumbuh kembangkan bersama, sehingga diperoleh kesadaran politik

III. Kesimpulan

Setiap bangsa dan negara yang memilih sistem demokrasi, realisasi pelaksanaannya melalui pemilihan umum bagi warganegara yang telah memiliki hak pilih. Perundang-undangan yang berlaku, memberi arah yang jelas dalam pelaksanaan. Namun didalam realisasinya, tidak mudah diselenggarakan sepanjang pendidikan pemilih dan yang dipilih belum memenuhi standar dalam proses politik seperti cerdas, kritis, amanah, dewasa dalam bertindak dan berpilih serta bertanggungjawab dalam tindakan politiknya/ Belum persoalan orientasi tindakan politiknya, belum bermartabat dalam proses politik yang dilakukan hanya berpikir pendek demi orientasi kepentingan sesaat dengan mengabaikan etika dan moral dalam proses politiknya. Pada akhirnya akan melemahkan jatidiri politik yang diamanatkan oleh founder father negara.

Pendidikan politik bagi segenap warganegara yang memiliki karakter dan struktur yang heterogin, perlu dilakukan secara simultan agar jangkauan seluruh lapisan dan segenap warganegara, dan tidak dilakukan dalam waktu yang pendek dan singkat pada saat pesta demokrasi berlangsung, melainkan butuh proses waktu dan proses politik melalui sosialisasi politik yang mendorong kesadaran berpartisipasi dalam menggunakan hak dan bertanggungjawab pada proses politiknya.

Rekonstruksi berpikir dan bertindak didalam penemuan jatidiri politik, akan melahirkan proses reinterpretasi positif terhadap seluruh proses politik. Terutama bagi kelompok pemilih yang heterogen, perlu disadarkan dalam berpartisipasi arah penyelenggaraan pemerintahan dan negara limatahun ke depan. Pada akhirnya kualitas penyelenggaraan proses politik melalui pemilu memiliki bobot yang sesuai dengan makna demokrasi.

Daftar Pustaka

- AB. Susanto, 1998, *Visi Global Para Pemimpin sinkretisme peradaban*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Irving M. Zeitlin, 1995, *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Jalaluddin Rakhmat, 1999, *Psikologi Komunikasi*, Penerbit CV. Remaja Karya, Bandung
- Marcel Mauss, 1992, *Pemberian: Bentuk dan Fungsi pertukaran*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mohtar Mas'ood dan Nasikun, 1987, *Sosiologi Politik*, Penerbit PAU-Studi Sosial UGM, Yogyakarta

Majalah Majelis, Edisi No.03/Th VIII/Maret 2014